



# PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG INSPEKTORAT KABUPATEN

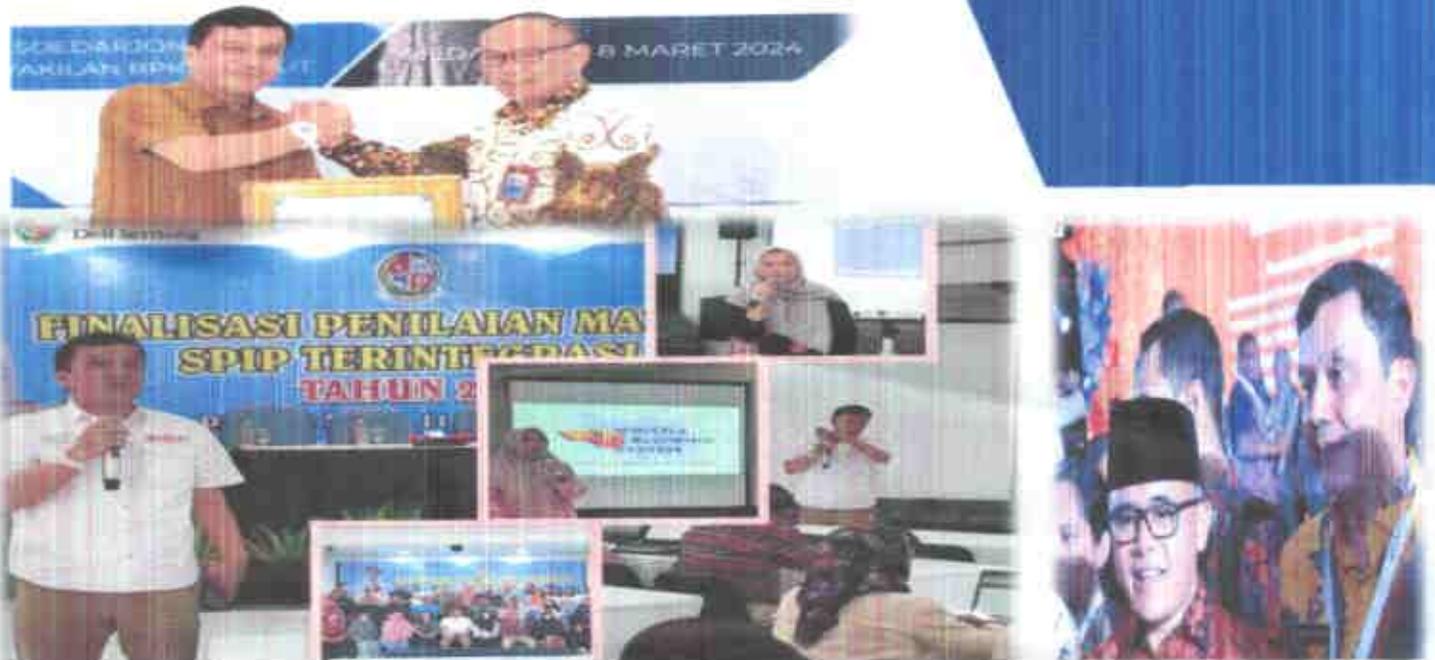
## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN

# 2024

### AKTIVITAS APiP LEVEL 3 PENGUKURAN APiP DAERAH KAWILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA

SOEDARSONO, ARIKLAN, BPNP, 8 MARET 2024



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas Rahmat dan RidhoNya kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 tepat waktu. LKIP Inspektorat Kabupaten Deli Serdang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran serta pengelolaan sumber daya kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. LKIP Tahun 2024 menggambarkan capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, analisisnya, serta permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target.

Pencapaian target tahun 2024 ini merupakan hasil partisipasi dan kerja keras seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Deli Serdang. Pencapaian ini semoga menjadi modal untuk terus meningkatkan kinerja melalui perbaikan budaya kerja dengan mengusung nilai-nilai integritas dan profesionalisme dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Akhir kata, semoga LKIP Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan memberikan manfaat dalam penyusunan rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Lubuk Pakam, 14 Februari 2025

**INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG**



**H. EDWIN NASUTION, SH., M.Si., CGCAE**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19741221 199803 1 010**

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan/sasaran organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan pada masing-masing indikator tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

#### 3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91%≤100%	Sangat Tinggi
2	76%≤90%	Tinggi
3	66%≤75%	Sedang
4	51%≤65%	Rendah
5	≤50%	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

### 3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Inspektorat tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Tujuan, Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	3,2 Level	3,012 Level	94,12	Sangat Tinggi	BPKP
	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	3,2 Level	3,012 Level	94,12	Sangat Tinggi	BPKP
		Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3 Level	2,516 Level	83,87	Tinggi	BPKP
2	Meningkatkan kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3,2 Level	3,27 Level	102,19	Sangat Tinggi	BPKP
	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3,2 Level	3,27 Level	102,19	Sangat Tinggi	BPKP
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai LHE AKIP Inspektorat	84 Nilai	75,52 Nilai	89,9	Tinggi	Inspektorat
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai LHE AKIP Inspektorat	84 Nilai	75,52 Nilai	89,9	Tinggi	Inspektorat
4	Meningkatkan kualitas layanan Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai	90 Nilai	100	Sangat Tinggi	Inspektorat
	Meningkatnya kualitas layanan Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 Nilai	90 Nilai	100	Sangat Tinggi	Inspektorat

Keterangan: Realisasi merupakan hasil pengolahan data

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa:

- Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis pada tahun 2024 adalah sebesar 94,016% dengan kriteria sangat tinggi.
- 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang diperjanjikan oleh Inspektur Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2024 mencapai target yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, dan 1 (satu) indikator kinerja yang diperjanjikan melebihi target yaitu Level Kapabilitas APIP.

- 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang diperjanjikan tidak mencapai target namun telah mencapai kinerja sangat tinggi yaitu Level Maturitas SPIP dan indikator yang mencapai kinerja tinggi yaitu Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi dan Nilai LHE AKIP Inspektorat.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas, diketahui juga bahwa kinerja tujuan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Tujuan 1: Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, belum tercapai.
- Tujuan 2: Meningkatkan kapabilitas APIP, dapat tercapai.
- Tujuan 3: Meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat, belum tercapai.
- Tujuan 4: Meningkatkan kualitas layanan Inspektorat, dapat tercapai.

### **Analisis Capaian Kinerja**

Adapun analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

#### **Sasaran 1: Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Indikator kinerja sasaran meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah:

#### **Level Maturitas SPIP dan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi**

Berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor PE.09.03/LHP-736/PW02/3.1/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, diketahui sebagai berikut: (*Lampiran 3*)

- Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah 3,012 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 3.
- Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,516 atau telah memenuhi karakteristik Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) level 2.

- Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,000 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada level 3. Indikator MRI ini tidak termasuk indikator kinerja sasaran, namun merupakan bagian dari indikator penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

Merujuk pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Interval Skor dan Karakteristik Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP**

No	Tingkat Maturitas	Interval Skor	Karakteristik
1	Rintisan	$1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$	Organisasi belum mampu mendefinisikan kinerjanya, termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya.
2	Berkembang	$2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan.
3	Terdefinisi	$3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif.
4	Terkelola dan Terukur	$4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.
5	Optimum	$\geq 4,50$	Organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, dengan struktur dan proses pengendalian telah efektif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Skor tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,012 menunjukkan karakteristik tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP "Terdefinisi". Tingkat maturitas terdefinisi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

bahwa 6 sub pilar belum mencapai skor 3 yaitu: Seperangkat Sistem Antikorupsi, Power (Kuasa & Wewenang), Saluran Pelaporan Internal yang Efektif, Integritas Organisasional, Investigasi, dan Tindakan Korektif.

Manajemen Risiko Indeks tidak ditetapkan pada indikator sasaran Inspektorat, namun merupakan bagian indikator dalam penyelenggaraan SPIP terintegrasi. Rincian nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Rincian Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) Tahun 2024**

Area/Komponen	Skor	Nilai
<b>Perencanaan</b>		<b>1,200</b>
Kualitas Perencanaan	3,000	1,200
<b>Kapabilitas</b>		<b>0,900</b>
Kepemimpinan	3,000	0,150
Kebijakan Manajemen Risiko	3,000	0,150
Sumber Daya Manusia	3,000	0,150
Kemitraan	3,000	0,075
Proses Manajemen Risiko	3,000	0,375
<b>Hasil</b>		<b>0,900</b>
Aktivitas Penanganan Risiko	3,000	0,563
<i>Outcomes</i>	3,000	0,338
<b>Nilai Manajemen Risiko Indeks</b>		<b>3,000</b>

Sumber: Laporan BPKP Nomor PE.09.03/LHP-736/PW02/3.1/2024

Skor nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,000 menunjukkan karakteristik "Terdefinisi". Tingkat nilai terdefinisi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Berdasarkan rincian Nilai Manajemen Risiko Indeks pada tabel di atas diketahui bahwa seluruh area penilaian telah mencapai skor 3.

## **Sasaran 2: Meningkatnya kapabilitas APIP**

Indikator kinerja untuk mengukur sasaran meningkatnya kapabilitas APIP adalah:

## Level Kapabilitas APIP

Berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor PE.09.03/LHP-367/PW02/6/2024 tanggal 28 Agustus 2024 hal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, diketahui bahwa capaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Deli Serdang berada pada "Level 3" dengan skor "3,27". (Lampiran 4)

Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. Penilaian kapabilitas APIP akan menghasilkan level kapabilitas APIP dari Level 1 s.d. Level 5 dengan penjelasan karakteristik sebagai berikut:

**Tabel 3.7 Karakteristik Level Kapabilitas APIP**

No	Level	Karakteristik
1	1 ( <i>Initial</i> )	Organisasi APIP telah terbentuk dan memiliki mandat pengawasan
2	2 ( <i>Structured</i> )	APIP melaksanakan mandat pengawasan dengan dukungan kualifikasi dan kompetensi SDM yang memadai
3	3 ( <i>Delivered</i> )	APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan ( <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> ) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola
4	4 ( <i>Institutionalized</i> )	APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi
5	5 ( <i>Optimized</i> )	APIP memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021

No.	Elemen, Topik	Skor	Skor Elemen
	Audit Kinerja ( <i>Performance Auditing</i> )	3	
	Assurance atas Tata Kelola Organisasi, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L/D ( <i>Overall Assurance on Governance, Risk, and Control/GRC</i> )	3	
	Jasa Konsultansi ( <i>Advisory Services</i> )	3	
<b>Level Kapabilitas APIP</b>		<b>3</b>	<b>3,270</b>

Sumber: Laporan BPKP Nomor: PE.09.03/LHP-367/PW02/6/2024

Berdasarkan rincian nilai Kapabilitas APIP pada tabel di atas diketahui semua elemen dan topik penilaian telah mencapai level 3 dengan aspek penilaian "implementasi" bahkan semua topik pada elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan elemen Praktik Profesional berada pada level 4 "Institutionalized".

### Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat

Indikator kinerja untuk mengukur sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat adalah:

#### Nilai LHE AKIP Inspektorat

Berdasarkan Laporan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Nomor 700.1.2.1/LHE.AKIP.140/INSP/2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, diketahui bahwa pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2024 berada pada nilai 75,52 masuk dalam kategori **SANGAT BAIK** dengan predikat **BB (75,52)**. (*Lampiran 5*)

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kategori predikat nilai AKIP adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.9 Kategori Predikat Nilai AKIP**

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	nilai >90-100	Sangat Memuaskan
2	A	nilai >80-90	Memuaskan
3	BB	nilai >70-80	Sangat Baik
4	B	nilai >60-70	Baik
5	CC	nilai >50-60	Cukup (Memadai)
6	C	nilai >30-50	Kurang
7	D	nilai >0-30	Sangat Kurang

Sumber: PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021

Nilai LHE AKIP Inspektorat sebesar 75,52 menunjukkan predikat BB dengan interpretasi sangat baik. Predikat BB (sangat baik) menunjukkan bahwa mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Namun demikian Inspektorat Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pengukuran kinerja sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi atas Kinerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang setiap triwulannya. Rincian Nilai LHE AKIP Inspektorat tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.10 Rincian Nilai LHE AKIP Inspektorat Tahun 2024**

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	Nilai Komponen
1	<b>Perencanaan Kinerja</b>	30		24,80
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	5,70	
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan ( <i>cascading</i> ) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> )	9	7,85	
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	11,25	

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai	Nilai Komponen
<b>2</b>	<b>Pengukuran Kinerja</b>	<b>30</b>		<b>22,46</b>
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6	5,40	
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	6,56	
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	10,50	
<b>3</b>	<b>Pelaporan Kinerja</b>	<b>15</b>		<b>11,76</b>
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja	3	2,80	
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,5	3,60	
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,5	5,36	
<b>4</b>	<b>Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	<b>25</b>		<b>16,50</b>
	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	25	16,50	
	<b>Nilai LHE AKIP Inspektorat</b>			<b>75,52</b>

Sumber: Laporan Inspektorat Kab. Deli Serdang Nomor 700.1.2.1/LHE.AKIP.140/INSP/2024

#### Sasaran 4: Meningkatkan kualitas layanan Inspektorat

Indikator kinerja untuk mengukur sasaran meningkatnya kualitas layanan Inspektorat adalah:

##### Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 90 nilai, menunjukkan pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Deli Sedang dengan kategori **A** atau **Sangat Baik**. (Lampiran 6)

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat

kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun kategori nilai IKM adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.11 Kategori Nilai IKM**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Pengguna jasa APIP Inspektorat didominasi oleh pihak internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima meliputi: 1) persyaratan 2) sistem, mekanisme, dan prosedur 3) waktu penyelesaian 4) biaya/tarif 5) produk spesifikasi jenis pelayanan 6) kompetensi pelaksana 7) perilaku pelaksana 8) penanganan pengaduan, saran, dan masukan 9) sarana dan prasarana.

Rincian nilai IKM Inspektorat Kabupaten Deli Serdang tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.12 Rincian Nilai IKM Inspektorat Tahun 2024**

Unsur Pelayanan	IKM Per Unsur	Kategori
1 Persyaratan Pelayanan	3,56	A
2 Prosedur Pelayanan	3,51	B
3 Waktu Penyelesaian	3,46	B

Dari tabel 3.13 diketahui bahwa layanan pemeriksaan regular, pemantauan pemeriksaan dan konsultasi memperoleh nilai sangat baik, sedangkan layanan pemeriksaan dengan tujuan tertentu memperoleh nilai baik.

### 3.1.3 Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2024 dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja 2024			Realisasi Tahun Sebelumnya			
		Target	Realisasi	Capaian %	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	3,2	3,012	94,12	2,65	3,018	3,052	3,178
	Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	3	2,516	83,87	-	2,87	2,87	2,61
Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3,2	3,27	102,19	2+	2	3,00	3,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai LHE AKIP Inspektorat	84	75,52	89,9	75,82	79,51	82,19	82,19
Meningkatnya kualitas layanan Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90	100	75	81,49	83,29	89,5

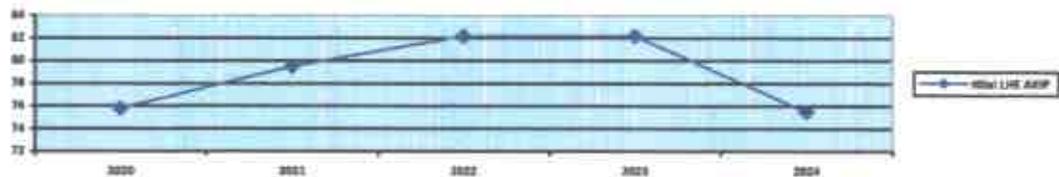
Sumber : Hasil pengolahan data

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya pada tabel di atas diketahui:

- Realisasi kinerja indikator Level Maturitas SPIP tahun 2024 meningkat dari tahun 2020 sebesar 0,362, namun menurun dari tahun: 2021 sebesar 0,006 poin, 2022 sebesar 0,04 poin, dan 2023 sebesar 0,166 poin.

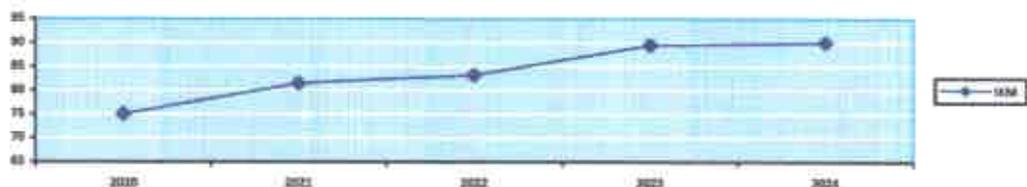
mendalam dan menyasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP.

**Gambar 3.4 Grafik Capaian Kinerja Nilai LHE AKIP**



- Realisasi kinerja indikator Nilai IKM terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Realisasi kinerja indikator Nilai IKM Inspektorat tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,5 poin dari tahun 2023, 6,71 poin dari tahun 2022, 8,51 poin dari tahun 2021 dan 15 poin dari tahun 2020.

**Gambar 3.5 Grafik Capaian Kinerja Nilai IKM**



### 3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Rencana Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Inspektorat periode tahun 2019-2024 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.15 Kemajuan Capaian Rencana Strategis**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Renstra (2024)	% Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	3,012	3,2	94,12
		Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	2,516	3	83,87
2	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3,27	3,2	102,19

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Renstra (2024)	% Tingkat Kemajuan
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai LHE AKIP Inspektorat	75,52	84	89,9
4	Meningkatnya kualitas layanan Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	85	105,88

Keterangan : Hasil pengolahan data

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir Renstra pada tabel di atas diketahui:

- Tingkat kemajuan realisasi kinerja indikator Level Maturitas SPIP tahun 2024 terhadap target akhir Renstra sebesar 94,12% atau selisih 0,188 poin (belum mencapai target akhir periode Renstra).
- Tingkat kemajuan realisasi kinerja indikator Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi tahun 2024 terhadap target akhir Renstra sebesar 83,87% atau selisih 0,484 poin (belum mencapai target akhir periode Renstra).
- Tingkat kemajuan realisasi kinerja indikator Level Kapabilitas APIP tahun 2024 terhadap target akhir Renstra sebesar 102,19% (telah melebihi target akhir periode Renstra).
- Tingkat kemajuan realisasi kinerja indikator Nilai LHE AKIP Inspektorat tahun 2024 terhadap target akhir Renstra sebesar 89,9% atau selisih 8,48 poin (belum mencapai target akhir periode Renstra).
- Tingkat kemajuan realisasi kinerja indikator Nilai IKM Inspektorat tahun 2024 terhadap target akhir Renstra sebesar 105,88% (telah melebihi target akhir periode Renstra).

### 3.1.5 Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional/provinsi/kabupaten diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.16 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/  
Provinsi/ Kabupaten**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
1	2	3	4	5	6 (4/5*100)
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Level Maturitas SPIP	3,012	3	100,4
		Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	2,516	3	83,87
2	Meningkatnya kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	3,27	3	109
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat	Nilai LHE AKIP Inspektorat	75,52	72	104,89
4	Meningkatnya kualitas layanan Inspektorat	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	75,47	119,25

Keterangan : Hasil pengolahan data

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional/provinsi/kabupaten pada tabel di atas diketahui:

1. Capaian realisasi kinerja indikator Level Maturitas SPIP tahun 2024 telah melebihi target nasional atau telah memenuhi karakteristik tingkat maturitas SPIP level 3. Adapun target nasional dalam hal ini adalah target kinerja pada Renstra BPKP Tahun 2020-2024.
2. Capaian realisasi kinerja indikator Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi tahun 2024 belum mencapai target nasional atau masih selisih 0,484 poin. Adapun target nasional dalam hal ini adalah target kinerja pada Renstra BPKP Tahun 2020-2024.
3. Capaian realisasi kinerja indikator Level Kapabilitas APIP tahun 2024 telah mencapai target nasional atau telah memenuhi karakteristik Kapabilitas APIP level 3, bahkan skor 3,27 telah melebihi target. Adapun target nasional dalam hal ini adalah target kinerja pada Renstra BPKP Tahun 2020-2024.
4. Capaian realisasi kinerja indikator Nilai LHE AKIP Inspektorat tahun 2024 telah melebihi target RPJMD atau telah memenuhi predikat BB Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun target RPJMD dalam hal ini adalah target kinerja pada Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.

Dan capaian BB juga telah melewati target B pada Renstra Kemenpan RB Tahun 2020-2024.

5. Capaian realisasi kinerja indikator Nilai IKM Inspektorat tahun 2024 telah melebihi target RPJMD. Adapun target RPJMD dalam hal ini adalah target kinerja pada Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020-2024.

### 3.1.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.17 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi yang Telah Dilakukan**

Indikator Kinerja, Target, Realisasi, dan Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan (Kelemahan)	Solusi yang Telah Dilakukan
<p>Level Maturitas SPIP Target: 3,2 Realisasi: 3,012 Capaian: 94,12</p>	<p><b>Analisis Keberhasilan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri sebagaimana ditetapkan dalam pedoman penilaian.</li> <li>- Sasaran strategis Pemda telah berorientasi hasil dan selaras dengan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, didukung dengan indikator kinerja yang SMART dengan target yang cukup menggambarkan pencapaian sasarnya.</li> <li>- Sasaran strategis Perangkat Daerah telah cukup sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi, berorientasi hasil, mempertimbangkan isu strategis, dan telah selaras dengan sasaran di atasnya dengan indikator dan target kinerja yang secara umum telah memenuhi kriteria SMART.</li> <li>- Standar kompetensi telah diimplementasikan/dimanfaatkan dalam pengelolaan/pembinaan SDM organisasi.</li> <li>- Pimpinan organisasi melaksanakan kebijakan dan didukung dengan SDM yang bekerja sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan.</li> <li>- Struktur organisasi dijalankan sesuai proses bisnis organisasi dengan SDM yang mencukupi.</li> <li>- Pelaksanaan tugas dan fungsi yang didelegasikan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan/prosedur yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 secara umum telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri dalam pedoman Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.</li> <li>- Perbaiki kualitas dokumen perencanaan jangka menengah (terkait sasaran, indikator kerjanya, targetnya) Pemda dalam Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.</li> <li>- Perbaiki kualitas dokumen perencanaan jangka menengah (terkait sasaran, indikator kerjanya, targetnya) Perangkat Daerah dalam Dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024.</li> <li>- Peningkatan kualitas sasaran strategis dan indikator kinerja yang SMART beserta targetnya dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP oleh KemenPANRB dan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.</li> <li>- Melakukan pengendalian terhadap penyediaan SDM, peta formasi jabatan, Anjab dan ABK, standar kompetensi jabatan, usulan promosi dan mutasi ASN, laporan Diklat dan rencana pelatihan/pengembangan kompetensi yang akan diikuti oleh pegawai.</li> <li>- Menetapkan beberapa kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan dan pembangunan lainnya.</li> </ul>

### 3.2 Realisasi Anggaran

Inspektorat Kabupaten Deli Serdang mendapat alokasi anggaran melalui APBD Perubahan Tahun 2024 sebesar Rp26.487.785.423,00 dan terealisasi sebesar Rp21.766.136.095,00 atau mencapai 82,17%. Capaian 82,17% menunjukkan nilai kinerja anggaran Inspektorat adalah baik (lebih dari 80% sampai dengan 90%). Realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.20 Capaian Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024**

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisai (Rp)	Capaian Keuangan (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.859.421.987,00	15.208.104.007,00	80,64	97,36
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.151.310,00	99.678.300,00	99,53	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.112.110,00	48.969.200,00	99,71	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	22.437.740,00	22.297.900	99,38	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	987.440,00	985.900,00	99,84	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.614.020,00	27.425.300,00	99,32	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.761.613.874,00	13.220.676.849,00	83,88	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.463.397.634,00	12.954.940.361,00	83,78	100,1
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	265.607.450,00	233.275.988,00	87,83	100
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.337.920,00	2.337.800,00	99,99	102,11
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.270.870,00	30.122.700,00	99,51	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.022.960.798,00	436.384.268,00	42,66	63,66
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84.000.000,00	0,00	0	0
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.039.198,00	1.038.300,00	99,91	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	937.921.600,00	435.345.968,00	46,42	77,33
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	920.998.837,00	670.471.648,00	72,8	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.412.220,00	5.337.000,00	98,61	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	157.461.680,00	0,00	0	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.079.795,00	95.587.400,00	98,46	100

	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	22.672.104,00	22.672.000,00	99,99	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.354.400,00	12.000.000,00	58,96	98,44
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.535.160,00	0,00	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	588.196.000,00	521.793.248,00	88,71	108
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.112.358,00	11.907.000,00	98,3	100
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1.175.120,00	1.175.000,00	99,99	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	216.380.320,00	0,00	0	0
	Pengadaan Mebel	195.820.320,00	0,00	0	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.560.000,00	0,00	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	535.420.848,00	500.755.249,00	93,53	100
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.040.000,00	5.036.250,00	99,93	73,99
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	171.370.080,00	141.414.999,00	82,52	100
	Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor	359.010.768,00	354.304.000,00	98,69	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.896.000,00	280.137.693,00	92,79	109,14
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.828.000,00	251.987.693,00	96,61	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.918.000,00	0,00	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.150.000,00	28.150.000,00	100	100
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	6.373.688.348,00	5.491.142.188,00	86,15	88,99
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.654.601.538,00	3.863.555.788,00	83,01	99,2
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.001.822.840,00	765.303.000,00	76,39	100
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2.062.831.250,00	1.732.181.900,00	83,97	100
	Reviu Laporan Kinerja	45.273.630,00	37.761.900,00	83,41	100
	Reviu Laporan Keuangan	26.653.000,00	18.051.700,00	67,73	100
	Pengawasan Desa	538.366.180,00	426.753.600,00	79,27	100
	Kerjasama Pengawasan Internal	76.754.638,00	76.684.000,00	99,91	100
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	902.900.000,00	806.819.688,00	89,36	100
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.719.086.810,00	1.627.586.400,00	94,68	100
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1.719.086.810,00	1.627.586.400,00	94,68	94,4
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.254.675.088,00	1.066.889.900,00	85,03	93,39
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10.987.620,00	10.987.300,00	99,99	125
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	10.987.620,00	10.987.300,00	99,99	100

	Pendampingan dan Asistensi	1.243.687.468,00	1.055.902.600,00	84,9	100
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	338.365.160,00	281.448.600,00	83,18	100
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	905.322.308,00	3.137.216.803,00	85,54	100

Berdasarkan pengukuran realisasi anggaran pada tabel di atas, diketahui bahwa seluruh program yang dilaksanakan memiliki nilai kinerja anggaran dengan kategori baik (lebih dari 80% sampai dengan 90%) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan.

Dari tabel di atas juga dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja anggaran sub kegiatan dibawah 80% dan tidak direalisasikan (0) karena adanya kebijakan *self blocking* dan efisiensi belanja daerah tahun anggaran 2024.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting dalam laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Inspektorat Kabupaten Deli Serdang menetapkan 4 (empat) sasaran strategis pada tahun 2024 dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur kinerja sasaran. Secara umum hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 sebagai berikut:

1. **Level Maturitas SPIP**

Capaian indikator Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berada pada 3,012 level dengan capaian sebesar 94,12% termasuk predikat capaian kinerja sangat tinggi. Capaian 3,012 belum mencapai target 3,2 level yang telah ditetapkan, capaian 3,012 telah memenuhi karakteristik maturitas SPIP level 3 yang menjadi target nasional.

2. **Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi**

Capaian indikator Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) berada pada 2,516 level dengan capaian sebesar 83,87% termasuk predikat capaian kinerja tinggi. Capaian 2,516 level belum mencapai target 3 level yang telah ditetapkan, capaian 2,516 belum memenuhi karakteristik Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi level 3 yang menjadi target nasional.

3. **Level Kapabilitas APIP**

Capaian indikator Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berada pada 3,27 level dengan capaian sebesar 102,19% termasuk predikat capaian kinerja sangat tinggi. Capaian 3,27 level telah melebihi target 3,2 level yang telah ditetapkan, dan telah memenuhi karakteristik Kapabilitas APIP level 3 yang menjadi target nasional.

#### 4. Nilai LHE AKIP Inspektorat

Capaian indikator Nilai Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) Inspektorat berada pada 75,52 nilai dengan capaian sebesar 89,9% termasuk predikat capaian kinerja tinggi. Capaian 75,52 nilai belum mencapai target 84 nilai yang telah ditetapkan, capaian 75,52 nilai (BB / sangat baik) telah melebihi target kinerja pada Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sebesar 72 nilai dan telah melewati target B (>60-70) nilai target nasional.

#### 5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berada pada 90 nilai dengan capaian sebesar 100% termasuk predikat capaian kinerja sangat tinggi. Capaian 90 nilai telah mencapai target 90 nilai yang telah ditetapkan, capaian 90 nilai (A/sangat baik) telah melebihi target kinerja pada Perubahan RPJMD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sebesar 75,47 nilai (B) dan telah melewati target B (76,61-88,30) nilai target nasional.

#### 6. Capaian Kinerja Anggaran

Capaian kinerja anggaran sebesar 82,17% dimana anggaran sebesar Rp26.487.785.423,00 dan terealisasi sebesar Rp21.766.136.095,00. Capaian 82,17% menunjukkan nilai kinerja anggaran Inspektorat adalah baik (lebih dari 80% sampai dengan 90%).

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat sebesar 94,02%, capaian kinerja anggaran Inspektorat sebesar 82,17%, dan dikatakan **EFISIEN** karena nilai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,15%.

Secara umum pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang memberikan dampak positif terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Deli Serdang. Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang mendukung capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2023 (berturut-turut sejak tahun 2019) dari Badan Pemeriksa Keuangan, nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024 sebesar 71,79 (BB/Sangat Baik) dan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2023 sebesar 67,11 (B/Baik) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Nilai Monitoring

Center for Prevention (MCP) tahun 2024 sebesar 88,74% (hijau) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

#### 4.2 Strategi Peningkatan Kinerja

Rekomendasi langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Mendorong perangkat daerah memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan *cascading* sesuai proses bisnis dengan indikator kinerja yang berorientasi *outcome*, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat.
2. Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen risiko secara menyeluruh di seluruh perangkat daerah.
3. Melakukan identifikasi akar penyebab temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK untuk selanjutnya menyusun pengendalian yang tepat untuk mencegah temuan berulang.
4. Meningkatkan sosialisasi antikorupsi yang efektif bagi pegawai agar menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui.
5. Meningkatkan pengendalian atas pengelolaan aset daerah secara efektif dengan memperhatikan keamanan aset baik secara hukum maupun fisik aset.
6. Menindaklanjuti *Area of Improvement* (AOI) kapabilitas APIP diantaranya:
  - Memanfaatkan pengetahuan pada organisasi yang diperoleh SDM APIP atas partisipasi pada organisasi profesi.
  - Menyusun pedoman role model di lingkungan APIP agar dapat dievaluasi.
7. Menindaklanjuti rekomendasi evaluasi AKIP internal diantaranya:
  - Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian *reward and punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
  - Memanfaatkan pelaporan kinerja dalam penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya.
8. Menindaklanjuti rekomendasi laporan SKM, diantaranya:

- Menyusun standar pelayanan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Menyusun SK Tim Pengelola Layanan.
- Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap hasil penilaian Survey Kepuasan Masyarakat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang untuk meningkatkan kinerjanya.

Lubuk Pakam, 14 Februari 2025

**INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG**



**H. EDWIN NASUTION, SH., M.Si., CGCAE**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19741221 199803 1 010**